

REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS MULAWARMAN MENYONGSONG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

Abdunnur¹, Hamdi Mayulu²

¹Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia

²Institution for Educational Development and Quality Assurance, Mulawarman University Rectorate Building 3rd Floor, Kuaro Street 1068, East Kalimantan, Indonesia

Correspondent Author: abdunnur@fpik.unmul.ac.id

ABSTRAK

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi berstatus Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri, dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi. Perubahan khususnya menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN.

Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Perguruan Tinggi, IKN

PENDAHULUAN

Perwujudan praktik tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi (*good university governance*) membutuhkan suatu pembaharuan dan perubahan mendasar di antaranya melalui pelaksanaan program-program reformasi birokrasi sehingga tercapai birokrasi yang bersih (bebas korupsi, kolusi, nepotisme), akuntabel, profesional, produktif, efektif dan efisien, pelayanan publik berkualitas (layanan prima) (Purwanto, 2020; Sunarno dan Solihin, 2017), serta memiliki kepercayaan masyarakat yang tinggi. *Monitoring* dan evaluasi dalam tata laksana proses reformasi birokrasi dapat menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) sehingga penerapan reformasi birokrasi dapat menjadi langkah preventif yang efektif dalam menekan perilaku korupsi (Sangka *et al.*, 2020).

Perguruan tinggi merupakan “institusi publik” yang memiliki tugas untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan sehingga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi (Sangka *et al.*, 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi sesuai amanat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di antaranya bertujuan untuk membangun Zona Integritas dan WBK/ WBBM pada satuan kerja dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi memiliki relevansi signifikan dengan pembangunan sebuah negara (Arifin, 2022). Reformasi birokrasi yang diterapkan di Unmul diharapkan dapat menunjang pendidikan yang bermutu karena prinsipnya pendidikan bermutu menjadi modal pembangunan manusia suatu bangsa (Arifin, 2022) termasuk dalam menunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).

PEMBAHASAN

Kebijakan Reformasi Birokrasi di Perguruan Tinggi

Reformasi birokrasi secara umum merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif) (Yuliatwati dan Prasetyo, 2018; Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019). Dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024; dan
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Kemen PPPA, 2020).

Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi menjadi suatu keharusan, mengingat perguruan tinggi merupakan bagian dari sektor publik (Sangka *et al.*, 2020) yang masih banyak mengalami permasalahan terkait dengan birokrasi, di antaranya:

1. Organisasi di sebagian besar perguruan tinggi relatif besar;
2. Proporsi dosen yang menjabat struktural di perguruan tinggi relatif besar;
3. Proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) non-akademik relatif besar (di 44% perguruan tinggi);
4. Inefisiensi, produktivitas, dan kualitas cenderung rendah; dan
5. *Resource sharing* yang kurang dalam artian penggunaan sarana bersama belum optimal (Kemenristek Dikti, 2017).

Sasaran utama reformasi birokrasi meliputi: 1) birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja; 2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik baik serta berkualitas (Labolo dan Indaryani, 2017; Anam *et al.*, 2020). Reformasi birokrasi pada perguruan tinggi dilakukan untuk merevitalisasi perguruan tinggi dan menempatkannya pada persaingan global sehingga membutuhkan sistem yang secara terintegrasi mampu mengarahkan sumber daya nasional untuk dapat berperan aktif pada situasi global (Buntari, 2017).

Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman

Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai perguruan tinggi yang telah memiliki status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), mewajibkan Unmul untuk melaksanakan segala jenis pelayanan secara mandiri mulai dari

mahasiswa, dosen, sampai tenaga kependidikan (pegawai) dan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*) melalui reformasi birokrasi. Praktik baik perwujudan *good university governance* (GUG) yang ditunjukkan dengan tata kelola yang menganut asas kredibilitas, transparansi akuntabilitas, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Indikator keberhasilan tata kelola Unmul pada tahun 2021 telah memperoleh akreditasi A berdasarkan SK BAN-PT Nomor:1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017, tanggal 23 Mei 2017, dan telah diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 273/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan 24 Mei 2027. Pencapaian peringkat akreditasi “unggul” oleh Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor: 3591/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Kehutanan pada Program Sarjana Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, sampai dengan 14 Juni tahun 2027. Universitas Mulawarman telah memperoleh pencapaian prestasi peringkat ke-14 dari 34 PTN BLU, pada Liga PTN BLU tahun 2022 (Surat Ditjen Dikti Ristek Nomor:1706/E1/DI.04.02/2022 tentang Hasil Evaluasi IKU tahun 2021) (LP3M, 2022). Program reformasi birokrasi di Unmul mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* reformasi birokrasi 2015–2019, serta secara teknis berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 sampai dengan 15 Tahun 2011.

Reformasi Birokrasi Unmul diawali pada tahun 2017, dimulai dengan penyusunan tonggak-tonggak reformasi birokrasi tahun 2017–2025 dan penyusunan tim reformasi birokrasi (tahun 2017) yang meliputi delapan area, yaitu 1) Manajemen perubahan; 2) Penguatan pengawasan; 3) Penguatan akuntabilitas kinerja; 4) Penguatan organisasi dan/atau kelembagaan; 5) Penataan tata laksana; 6) Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur; 7) Penataan peraturan perundang-undangan; dan 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Universitas Mulawarman dalam rangka merencanakan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi didukung oleh tim reformasi birokrasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 777/KP/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Mulawarman. Tim Reformasi Birokrasi bertugas untuk merumuskan *road map* pada setiap area dan *quick wins*, merancang rencana manajemen perubahan, mendampingi pelaksanaan *quick wins*, memelihara area yang telah maju, *me-monitoring* dan mengevaluasi secara berkala, dan sebagai *agent of change*. Tim Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman telah melakukan progres yang telah ditentukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian di antaranya:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilakukan dengan melibatkan dari berbagai Satuan Unit Kerja yang terkait dan saling bersinergi, baik di tingkat fakultas maupun universitas.
3. Penyusunan Peta Proses Bisnis
Penyusunan Peta Proses Bisnis Unmul dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur setiap unit kerja.
4. Bizagi
Bizagi merupakan aplikasi yang mengemas SOP dalam sebuah *room* besar yang di dalamnya terdapat *room* kecil (berisi SOP unit kerja yang saling beririsan antara satu unit dan unit yang lain);
5. Unit Layanan Terpadu
Unit Layanan Terpadu (ULT) Unmul merupakan representasi dari reformasi birokrasi dan terlaksananya zona integritas, serta termasuk program percepatan (*quick wins*) dalam reformasi birokrasi.
6. Penentuan Fakultas Teknik sebagai Zona Integritas (ZI)
Program reformasi birokrasi Unmul merupakan program terlembaga dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, efektif, efisien, bersih, berkualitas, serta menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa diskriminasi dan nilai profesional. Reformasi birokrasi yang telah dilakukan Unmul bersinergi dengan tujuan Unmul, yaitu: 1) memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien;

serta 2) memperkuat kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola Unmul (*good university governance*).

Relevansi Reformasi Birokrasi Universitas Mulawarman terhadap Pembangunan IKN

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, serta kinestetik dalam rangka mempersiapkan pemimpin bangsa di berbagai sektor kehidupan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumber daya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja pegawai. Birokrasi memiliki peran penting dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara karena berperan menopang pelaksanaan fungsi pemerintahan seperti pelayanan publik, regulasi, proteksi, dan distribusi. Birokrasi pada negara modern kehadirannya diperlukan sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat dalam memberikan layanan terbaik (Alfiandri, 2012), cepat, tepat, dan profesional kepada publik (Anam *et al.*, 2020). Birokrasi digambarkan sebagai organisasi formal yang memiliki kedudukan dan cara kerja terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisah yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal (Yusriadi, 2018).

Reformasi birokrasi termasuk langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, transparan, bersih, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar, serta kode etik aparatur negara untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi prioritas menuju pemerintahan kelas dunia. Pencapaian sasaran-

sasaran reformasi birokrasi secara bertahap di Unmul diharapkan mampu menghasilkan *governance* yang berkualitas. Kualitas *governance* yang semakin baik akan menghasilkan pembangunan (*development outcomes*) semakin baik pula. *Governance* yang berkualitas ditandai dengan 1) tidak ada korupsi; 2) tidak ada pelanggaran; 3) APBN dan APBD baik; 4) program terselesaikan dengan baik; 5) perizinan seluruhnya selesai dengan cepat dan tepat; 6) komunikasi dengan publik baik; 7) waktu (jam kerja) efektif dan produktif; 8) menerapkan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan; dan 9) hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, pralapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan) (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2019).

Reformasi birokrasi dalam suatu negara diarahkan pada proses transformasi *mindset* dan *culture set* pada tatanan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat (Yusriadi, 2018). Birokrasi pada pembangunan IKN dapat berperan sebagai instrumen dalam masyarakat dan sebuah konsekuensi logis bahwa negara memiliki misi untuk menyejahterakan masyarakat (Yusriadi, 2018). Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel (Yusriadi, 2018). Orientasi pelayanan publik kepada masyarakat tidak hanya berperan untuk peningkatan kinerja birokrasi, tetapi juga menjadi unsur strategis dalam mengembangkan pelayanan birokrasi pemerintah di masa depan (Yasa *et al.*, 2021). Penerapan nilai-nilai reformasi birokrasi harus sejalan dengan prinsip anti korupsi agar tertanam jiwa berintegritas (Huberts, 2018; Sangka *et al.*, 2020). Praktik korupsi, khususnya di perguruan tinggi memberikan dampak negatif terhadap tata kelola dan sumberdaya manusia di suatu negara, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya daya saing perguruan tinggi, serta terkikisnya nilai-nilai kebangsaan dalam budaya korupsi lintas generasi (Salahudin *et al.*, 2019).

KESIMPULAN

Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan/atau perguruan tinggi, khususnya menyangkut area kelembagaan, sumberdaya aparatur, akuntabilitas, pengawasan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik sehingga mampu

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, disiplin, serta etos kerja. Program reformasi birokrasi dan zona integritas dibutuhkan Unmul dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih, serta Melayani (WBBM) yang dapat menunjang pembangunan IKN. Upaya pelaksanaan program reformasi birokrasi dan zona integritas membutuhkan:

1. Optimalisasi peran tim reformasi birokrasi (di delapan area) di tingkat universitas dan zona integritas di tingkat fakultas dan/atau lembaga;
2. Sinkronisasi semua sistem reformasi birokrasi di delapan area dengan zona integritas melalui digitalisasi; dan
3. Pengembalian fungsi unit layanan terpadu sebagai bagian dari representasi reformasi birokrasi dan zona integritas.

REFERENSI

- Alfiandri. 2012. Reformasi birokrasi di era otonomi daerah. *SOSIO-RELIGIA* 10(1): 179–200.
- Anam K, Suryadi, Hermawan. 2020. Implementation of integrity zone development in strengthening the quality of public services in the conservation center of Purwodadi Garden Plantation - Indonesian Science Institution. *WACANA*. 23(2): 142–149.
- Arifin M. 2022. Permasalahan dalam reformasi birokrasi dalam sektor pendidikan. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 16(3): 1049–1064. DOI: <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.981>.
- Buntari. 2017. (Re) Formasi birokrasi: profesionalisme birokrat pada level perguruan tinggi. *DIMENSI*. 10(1): 5–13.
- Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. 2019. Buku saku reformasi birokrasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Huberts LWJC. 2018. Integrity: what it is and why it is important. *Public Integrity*. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.1080/10999922.2018.1477404>

- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). 2017. Reformasi birokrasi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. Ringkasan kegiatan reformasi birokrasi internal tahun 2010. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 2020. Buku panduan tim reformasi birokrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Download pada tanggal 14 Juli 2022. Tersedia: <https://s.id/1h1Z8>
- Labolo M, E Indaryani. 2017. Bureaucratic reform and the challenge of good governance implementation in Indonesia. *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy*. 2(4): 26–47. DOI: <http://dx.doi.org/10.222.99/arpap/2017.26>
- Lembaga Pengembangan Pendidikan, dan Penjaminan Mutu (LP3M). 2022. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi perguruan tinggi. Universitas Mulawarman.
- Purwanto R. 2020. Percepatan implementasi reformasi birokrasi di pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2020-2024. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*. 1(21): 84–103.
- Sangka KB, AN Probohudono, OH Nurcahyono. 2020. Optimalisasi program reformasi birokrasi perguruan tinggi menggunakan AHP dan BSC. *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi*. 4(2): 167–170. DOI: <https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.365>
- Salahudin, A Nurmandi, M Fajar, D Mutiarin, B Siregar, T Sulistyaningsih, Jainuri, R Agusta, K Karinda. 2019. Developing integrity university governance model in Indonesia. *International Journal of Higher Education*. 8(5): 185–199. DOI: <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p185>
- Sunarno, Solihin. 2017. Analisis reformasi birokrasi dalam perspektif transformasional kinerja dosen di sekolah tinggi penerbangan Indonesia curug tangerang. *Jurnal Ilmiah Aviasi Langit Biru*. 10(2): 1–8.

Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

- Yulawati E, K Prasetyo. 2018. Bureaucracy reform implementation of legislative institutions in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 219: 186–202.
- Yusriadi. 2018. Indonesian bureaucratic reform: opportunities and obstacles. *Public Administration Journal*. 8(2): 178–185. DOI: <https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>

UNMUL HEBAT,
KALTIM BERDAULAT, **ika** KUAT:
Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman
di Usia 60 Tahun

Volume 1

UNMUL HEBAT,
KALTIM BERDAULAT, **ika** KUAT:
Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman
di Usia 60 Tahun

Volume 1

Tim Penulis



Anggota IKAPI
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua, Samarinda,
Kalimantan Timur, Indonesia, 75119

C.01/12.2022

DAFTAR ISI

PENGANTAR:

Unmul sebagai Pilar Penting dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kaltim Guna Memperkuat Nusantara <i>Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.</i>	v
--	---

EDITORIAL:

Perspektif Akademik Mewujudkan Kaltim Berdaulat dan IKN yang Kuat <i>Mustofa Agung Sardjono, Lambang Subagiyo, Anton Rahmadi</i>	ix
---	----

DAFTAR ISI.....	xxi
-----------------	-----

KEBIJAKAN DAN SOSIAL POLITIK..... 1

REFORMASI BIROKRASI DI UNIVERSITAS MULAWARMAN MENYONGSONG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA <i>Abdunnur, Hamdi Mayulu</i>	3
--	---

<i>SENSE OF BELONGING</i> MASYARAKAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA BARU <i>Silviana Purwanti, Netty Dyan Prastika</i>	13
---	----

SEKURITISASI IDENTITAS KOMUNITAS MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH IKN <i>Sonny Sudiar, Rahmah Daniah</i>	29
---	----

PENGUATAN TATA LAKSANA DAN SUMBER DAYA APARATUR DALAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA <i>Daryono, Fajar Apriani, Kus Indarto</i>	43
---	----

DAYA DUKUNG POLITIK LOKAL KALIMANTAN TIMUR DALAM MEMBANGUN IKN: DEMOKRASI, KEBERAGAMAN, DAN KESADARAN POLITIK <i>I Ketut Gunawan, Muhammad Noor, Mohammad Taufik</i>	65
---	----

Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

DAMPAK SOSIAL-BUDAYA RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, IDENTIFIKASI DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA <i>Harihanto</i>	87
KONSTRUKSI HUKUM IBU KOTA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA <i>Alfian</i>	101
IMPLIKASI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL <i>Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty, Grizelda</i>	113
KESEHATAN DAN KEFARMASIAN	131
POTENSI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM PEMENUHAN DAN PEMERATAAN DOKTER DAN DOKTER SPESIALIS ANTISIPASI KEBERADAAN IBU KOTA NEGARA (IKN) DI KALIMANTAN TIMUR <i>Rahmat Bakhtiar, Ika Fikriah, Siti Khotimah, Sulistiawati, Moriko Pratiningrum, Fritz Nahusuly</i>	133
OPTIMALISASI UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT BERBASIS KEPERAWATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DI IBUKOTA NEGARA “NUSANTARA” DI KALIMANTAN TIMUR <i>Ruminem, Dwi Nopriyanto, Rita Puspa Sari, Bahtiar, Muhammad Aminuddin</i>	147
KESEHATAN GIZI MASYARAKAT DI IBU KOTA NUSANTARA: SITUASI TERKINI BALITA <i>STUNTING</i> , <i>UNDERWEIGHT</i> , <i>WASTING</i> , GIZI LEBIH DAN GEMUK DI KALIMANTAN TIMUR <i>Meiliati Aminyoto, Evi Fitriany, Riries Choiru Pramulia Yudia, Krispinus Duma, Muhammad Khairul Nuryanto, Ronny Isnwardana, Swandari Paramita</i>	175

DETERMINAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI MASYARAKAT DI IKN NUSANTARA <i>Nisa Muthi'ah, Cicih Bhakti Purnamasari, Cristiani Nadya Pramasari, Nydia Hanan, Dewi Arsih Sulistiani, Imran Irsal</i>	187
PANGAN LOKAL HUTAN TROPIS LEMBAP DALAM PENCEGAHAN STUNTING <i>Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, Nurul Afiah, Reny Noviaty</i>	203
PERAN KADER POSYANDU SEBAGAI GARDA DEPAN DALAM MENCIPTAKAN RUMAH BEBAS ASAP ROKOK SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEHAT DI WILAYAH PENUNJANG IKN <i>Nur Rohmah, Riza Hayati Ifroh, Annisa Nurrahmawati, Lies Permana, Rina Tri Agustini</i>	219
ANALISA POTENSI PEMANFAATAN TANAH LIAT KAMPUNG KUTAI LAMA DALAM REDUKSI MIKROBA PATOGEN PADA LIMBAH CAIR DOMESTIK <i>Blego Sedionoto, Vivi Vilia Elvira, Sitti Badrah</i>	237
SURVEI KEPUASAN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PENYANGGA IKN <i>Ratno Adrianto, Iwan M. Ramdan, Reny Noviasty, Rahmi Susanti, Chaerunnisa AR, Dewi Yuniar</i>	249
POTENSI BIODIVERSITAS TUMBUHAN KALIMANTAN TIMUR UNTUK Mendukung Kemandirian Bahan Baku Obat Herbal dalam Negeri <i>Islamudin Ahmad</i>	259
POTENSI NUTRASETIKAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR <i>Yurika Sastyarina, Ummi Khuzaimah, Helmi, Dwi Elfira Kurniati</i>	275

Unmul Hebat, Kaltim Berdaulat, IKN Kuat:

Kontribusi Pemikiran Universitas Mulawarman di Usia 60 Tahun Volume 1

EKSTRAK MANGROVE UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS HATCHERY <i>Gina Saptiani</i>	291
KETAHANAN ENERGI, KETAHANAN PANGAN DAN LAHAN	311
MEMBANGUN PENYANGGA PANGAN KALTIM DAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN) <i>Bernatal Saragih</i>	313
STATUS MIKROBIA DAN KESUBURAN TANAH PADA LAHAN PASCA TAMBANG BATU BARA MENUJU PENGELOLAAN LAHAN YANG BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI PT. ALAM JAYA PRATAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA) <i>Sopialena</i>	327
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI SUMBERDAYA LAHAN AREAL REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BATUBARA DI KALIMANTAN TIMUR <i>Mulyadi</i>	343
STRATEGI PEMANFAATAN DAN NILAI TAMBAH DARI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) UNTUK Mendukung IKN Yang Kuat <i>Irawan Wijaya Kusuma, Harlinda Kuspradini, Enos Tangke Arung, Enih Rosamah, Agmi Sinta Putri</i>	355
PERAN STRATEGIS SEKTOR KEHUTANAN DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN ENERGI DI KALIMANTAN TIMUR: PERCEPATAN PENYEDIAAN LISTRIK DESA DI WILAYAH PEDALAMAN (<i>REMOTE AREA</i>) <i>Rudianto Amirta, Wiwin Suwinarti, Yuliansyah, Muhammad Taufiq Haqiqi, Dwi Susanto, dan Retno Wulandari</i>	391

ANALISIS DAYA DUKUNG TANAH DAN BATUAN, KONDISI GEOHIDROLOGI SERTA POTENSI KEBENCANAAN WILAYAH IBU KOTA NEGARA “NUSANTARA” DARI SUDUT PANDANG GEOLOGI <i>M. Dahlan Balfas, M. Amin Syam, Koeshadi Sasmito, Diana Rahmawati</i>	415
MEWUJUDKAN SWASEMBADA ENERGI DAERAH MELALUI PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DALAM MENINGKATKAN DAYA DUKUNG IKN NUSANTARA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR <i>Dadan Hamdani, A. Inu Natalisanto, Suhadi Mulyono, Rahmawati M</i>	433
MENUJU KETAHANAN ENERGI INDONESIA DI MASA DEPAN <i>Anton Rahmadi</i>	451
PERTANIAN ENERGI SEBAGAI SEBUAH BASIS EKONOMI PASCA TAMBANG <i>Anton Rahmadi dan Yazid Ismi Intara</i>	473
KONTRIBUTOR	503